



## PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PAJAK PRATAMA MAKASSAR BARAT

**Hisnol Jamali**

Akuntanis, STIEM Bongaya, Makassar, Indonesia.

E-mail: [\\*hisnol.jamali60@gmail.com](mailto:*hisnol.jamali60@gmail.com)

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak sifat administrasi informasi pengeluaran, membebaskan aset pendukung terhadap konsistensi individu warga di Istansi Dinas Pratama Makassar Barat. Metode pengumpulan informasi memanfaatkan informasi penting yang diperoleh dari jajak pendapat. Populasi dalam penelitian ini diketahui bahwa individu warga yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat sebanyak 105.873 responden. Metode pengujian dalam ulasan ini menggunakan prosedur slovin. Sedangkan contoh yang diambil berjumlah 95 orang. Efek samping dari informasi jajak pendapat telah dicoba dengan instrumen sebagai uji legitimasi dan uji ketergantungan. Uji praduga yang patut dicontoh diketahui bahwa sebagai uji kebiasaan, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Teknik pemeriksaan informasi menggunakan berbagai strategi pemeriksaan kekambuhan langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelayakan Bantuan (X1) berdampak nyata terhadap Konsistensi Warga Negara (Y), Informasi Tugas (X2) berdampak nyata terhadap Konsistensi Warga Negara (Y) dan Otorisasi Pengeluaran (X3) berdampak nyata terhadap Konsistensi Warga Negara (Y).*

**Kata Kunci:** *Kelayakan Administrasi, Informasi Pengeluaran, Otorisasi Tugas, Warga Negara Perorangan.*

### PENDAHULUAN

Pungutan merupakan penerimaan negara yang terbesar dan memegang peranan penting bagi keterpaduan kemajuan negara di Indonesia. Retribusi diketahui bahwa pungutan warga yang dibayarkan oleh individu kepada negara dan akan digunakan untuk membantu pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan dan keuntungannya tidak akan dirasakan secara langsung, karena retribusi digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. minat. Namun permasalahan yang sering terjadi diketahui bahwa masih banyak masyarakat yang belum memenuhi komitmen pengeluarannya, atau pada akhirnya masih banyak kehak pembayaran yang belum terpenuhi, khususnya warga negara perorangan (Rahayu: 2017).

Menurut Wardani dan Wati (2018), pungutan memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia karena pungutan merupakan hotspot utama bagi negara Indonesia untuk membiayai Rencana Keuangan Negara (APBN). Salah satu unsur yang dapat ditekankan oleh aparat dalam meningkatkan kesadaran dan konsistensi pungutan diketahui bahwa dengan menyebarluaskan imbauan pungutan baik melalui pengarah, himbuan moral baik melalui buletin, papan, maupun dengan membuka situs imbauan tugas yang dapat diakses kapanpun oleh warga negara.

Menurut Bhaktiar dan Harris (2020), pungutan sebagai salah satu bentuk penerimaan dan penerimaan negara harus diawasi dengan baik dan terus menerus ditingkatkan, sehingga perbaikan masyarakat dapat dilakukan dengan kapasitasnya sendiri sesuai dengan pedoman kemerdekaan. Oleh karena itu, konsistensi setiap warga negara dalam bidang ketetapan retribusi harus diperluas, mengingat secara umum masih banyak warga negara yang hampir tidak mengenal kebebasan dan kehak pembayarannya di bidang retribusi. koleksi. (Bhaktiar dan Harris, 2020),

Konsistensi warga negara (WP) diketahui bahwa wujud konsistensi dan perhatian terhadap cicilan dan perincian komitmen pengeluaran berkala dan tahunan oleh warga negara sesuai peraturan dan pedoman serta pengaturan tugas. Sesuai Liberti Pandiangan (2014) konsistensi warga (WP) menyelesaikan komitmen pengeluaran merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan WP di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Retribusi (DJP). Artinya, derajat konsistensi WP akan menjadi dasar

pemikiran DJP dalam melakukan pengarahan, pengawasan, pengurusan dan tindak lanjut WP. Misalnya apakah akan ada permintaan atau penyutradaraan atau penjajakan atau penilaian dan lain-lain seperti ujian WP. Konsistensi warga juga dapat diartikan sebagai disposisi terhadap kemampuan biaya, sebagai pengelompokan bintang dari bagian mental, sukses, dan konatif yang bekerja sama dalam mencari tahu, merasakan dan bertindak terhadap makna dan kemampuan tugas (Wujarso dan Napitupulu, 2020)

Tingkat konsistensi warga dapat didampaki oleh beberapa variabel, termasuk beban hukuman tugas, kelayakan administrasi, dan penggunaan kerangka kerja organisasi beban yang canggih. (Savitri dan Nuraina, 2017). Selain itu, banyak variabel yang dapat memdampaki konsistensi individu warga, yang dalam penelitian ini menggunakan tiga faktor yang memdampaki konsistensi individu warga, antara lain: kelayakan administrasi, informasi biaya, dan hukuman kehak pembayaranan.

Administrasi muatan diketahui bahwa administrasi yang diberikan oleh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Tugas kepada masyarakat umum sesuai dengan pedoman tugas yang berlaku. (Pedoman Kepala Jenderal Tugas Nomor PER-02/PJ/2014).

Menurut Erica (2021), sifat administrasi yang diberikan oleh perangkat biaya memengaruhi konsistensi warga, menunjukkan bahwa administrasi tugas yang baik dan berkelayakan dapat menjadi dasar atau tolok ukur untuk meningkatkan konsistensi warga dalam menyelesaikan komitmen penilaian mereka.

Dampak dari sifat administrasi biaya pada konsistensi warga negara sesuai Bhaktiar dan Harris (2020), yang menyatakan bahwa kelayakan bantuan memdampaki konsistensi warga negara individu, dan hasil yang dialami oleh Paramartha dan Rasmini (2018), menyatakan bahwa kelayakan bantuan secara tegas memdampaki konsistensi warga korporat.

Menurut Paramartha dan Rasmini (2018) Informasi diketahui bahwa konsekuensi dari “mengetahui” dan ini terjadi setelah individu merasakan suatu barang tertentu. Informasi tentang pemungutan retribusi diketahui bahwa pemahaman warga negara yang dapat menafsirkan undang-undang, peraturan, sistem bea yang benar. Selain itu, pemahaman ini dapat dilakukan terhadap sikap tunduk dalam menyelesaikan komitmen biaya. Informasi tentang pedoman biaya sangat penting untuk menumbuhkan perilaku yang konsisten. Karena bagaimana warga bisa ikut jika tidak tahu bagaimana aturan pengeluarannya.

Adanya informasi yang baik tentang ketetapan retribusi dapat membantu meningkatkan konsistensi warga terhadap pentingnya penyelesaian pungutan dan warga serta warga dapat melakukan seperti per pungutan peraturan dan pedoman. Jika warga tidak mengetahui tentang aturan dan siklus pengisian daya, maka pada saat itu warga tidak dapat menentukan cara berperilaku yang baik.

Dampak informasi pengeluaran terhadap konsistensi warga negara sesuai dengan Wardani dan Wati (2018), yang menyatakan bahwa informasi biaya secara tegas memdampaki konsistensi warga negara, dan hasil yang ditemukan oleh Paramartha dan Rasmini (2018), menyatakan bahwa informasi biaya secara tegas memdampaki konsistensi warga negara.

Hukuman pembebanan merupakan jaminan bahwa pengaturan regulasi biaya (standar pembebanan) akan dipatuhi, dipatuhi dan disetujui. Atau lagi-lagi pada akhirnya, hukuman pungutan menjadi alat penghambat agar warga tidak mengabaikan standar pungutan. (Erica, 2021), Duty Authorizations membuat permintaan tanpa henti di Indonesia, serta alasan yang sah bagi otoritas publik untuk memutuskan warga negara yang melanggar hukum. Hukuman pembebanan dibuat dengan maksud agar warga enggan menyalahgunakan Peraturan Pengeluaran.

Dampak hukuman pengeluaran terhadap konsistensi individu warga negara sebagaimana ditunjukkan oleh Bhaktiar dan Harris (2020), yang menyatakan bahwa hukuman kehak pembayaranan memengaruhi individu warga negara, dan hasil yang ditemukan oleh Erica (2021), menyatakan bahwa hukuman biaya pada dasarnya memengaruhi konsistensi individu warga negara.

Ketua Umum Pembiayaan periode 2001-2006, Hadi Poernomo, memaparkan proporsi tugas Indonesia yang tak henti-hentinya diubah selama lima tahun ke depan. Ini bukan pemenuhan pendapatan bea setelah darurat terkait uang yang menghancurkan perekonomian Indonesia pada tahun 1998.

Pemeriksaan ini dikuatkan dengan keanehan yang terjadi, pengakuan PPh Bertenaga Lebih yang diputar kembali pada Walk 2020 karena rendahnya konsistensi warga negara (WP) non-pekerja. Hal itu karena WP Operasional nonpekerja memiliki kebijaksanaan untuk menunda pengungkapan formulir pengeluaran tahunan dan angsuran cukai karena pencabutan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Penilai (DJP). Pengungkapan Formulir Pengeluaran Pribadi Tahunan Over Power, yang biasanya harus



diperhitungkan pada Walk 31, telah ditangguhkan hingga 30 April. Ini juga berlaku untuk menyimpan biaya pada SPT dan tidak ada otorisasi yang terlambat. Kasus lain yang dimuat dalam suarakaltim.id diketahui bahwa menyimpan tagihan yang telah disimpan atau dikumpulkan pada transaksi/penyerahan Produk Tersedia (BKP) dan menggunakan permintaan biaya yang tidak terkait dengan pertukaran nyata.

Kepala Bidang Pembinaan, Tata Usaha dan Periklanan Dinas DJB Provinsi Kaltim Sihaboedin Effendy mengatakan, tersangka melakukan aksi unjuk rasa melawan hukum pada masa penjajakan Januari 2014 hingga Desember 2015 di Samarinda. "Tersangka tegas terkait dengan penyalahgunaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengaturan Umum dan Tata Cara Pembelanjaan atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pembuatan Jabatan dan Pasal 64 KUHP," katanya.

Berdasarkan catatan Dinas Uang, proporsi pengeluaran pada 2016 sebesar 10,37 persen, kemudian turun hingga 9,89 persen pada 2017, naik tipis menjadi 10,24 persen pada 2018. Kemudian, pada saat itu, pada tahun 2019 turun kembali menjadi 9,76 persen dan turun menjadi 8,33 persen pada tahun 2020. "Hal ini berbanding terbalik dengan pencapaian pendapatan pengeluaran setelah krisis keuangan. Pada saat itu pendapatan biaya terus mengalami peningkatan. Tahun 2005 mencapai 12,6 persen," jelasnya di Jakarta, Selasa (31/8).

Faktanya, efek dari Darurat Terkait Uang yang memdampaki darurat kompleks pada tahun 1997-1998, meninggalkan perekonomian dalam kehancuran. Interaksi pemulihan menghabiskan sebagian besar hari. Hingga bertahun-tahun, bangsa ini masih goyah dari kesulitan.

Bapak Harry Azhar Azis, mantan Pengurus Badan Pengkajian Tiada Banding (BPK) tahu bahwa prestasi ini tidak bisa didapat seperti membalikkan telapak tangan. DJP membutuhkan kerja keras untuk menjamin penerimaan bea masuk sesuai target yang ditetapkan.

Mengingat badan publik telah menetapkan pendapatan pungutan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2022 sebesar Rp1.506,9 triliun. Angka tersebut naik 9,5 persen dari pendapatan penilaian tahun berjalan yang mencapai Rp 1.375,8 triliun.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Hadi merekomendasikan agar otoritas publik secara andal menjalankan program kombinasi informasi dalam SIN Pengeluaran melalui MoU dengan berbagai organisasi, baik pemerintah maupun organisasi rahasia, sebagai bagian dari perubahan tugas. Selain itu, beban SIN terbukti dapat meningkatkan pendapatan di tahun-tahun sebelumnya.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan pemeriksaan kuantitatif dengan pemikiran logis rasional/kuantitatif. Area yang digunakan sebagai area eksplorasi diketahui bahwa Istandi Administrasi Biaya Esensial Makassar Barat yang beralamat di Jl. Koridor Kota No.15, Baru, Kec. Kota Ujung Pandang Makassar, Sulawesi Selatan . Populasi dalam penelitian ini diketahui bahwa populasi dalam penelitian ini diketahui bahwa individu warga yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat sebanyak 105.873 responden. Jaminan ukuran tes yang diambil dalam ulasan ini menggunakan ukuran populasi dengan menghitung resep Slovin. Tipe ragam informasi dalam penelitian ini diketahui bahwa cross area. Cross segment diketahui bahwa suatu konsentrasi dimana rencana pemilihan informasi dilakukan pada satu waktu. Jenis informasi yang digunakan dalam pemeriksaan ini diketahui bahwa informasi kuantitatif. Informasi kuantitatif diketahui bahwa jenis informasi yang dapat diperkirakan atau ditentukan secara langsung, sebagai data atau klarifikasi yang dikomunikasikan dalam angka atau sebagai angka. Sumber informasi dalam eksplorasi ini diketahui bahwa informasi yang penting. Informasi esensial diketahui bahwa informasi yang dikumpulkan sendiri oleh analis secara langsung dari sumber utama atau dari mana objek eksplorasi dilakukan (Siregar, 2013). Dalam ulasan ini, strategi pengumpulan informasi yang digunakan diketahui bahwa survei tertutup. Dalam ulasan ini, metode pengumpulan informasi yang digunakan diketahui bahwa polling tertutup. Seperti yang ditunjukkan oleh Sugiyono (2015) polling diketahui bahwa prosedur pemilihan informasi yang dilakukan dengan cara memberikan sekumpulan penjelasan yang tersusun kepada responden untuk dibalas. Shut survey, khususnya jajak pendapat yang akan meminta responden memilih di antara beberapa pilihan yang telah diberikan oleh para ilmuwan. Teknik logis yang digunakan diketahui bahwa banyak investigasi relaps langsung yang digunakan untuk menguji dampak lebih dari satu 34 faktor bebas pada variabel dependen. Alat menggunakan SPSS 25. Kondisi relaps langsung yang berbeda diketahui bahwa sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

- Y = Konsistensi Warga Negara Individu
- a = Stabil
- $\beta$  = Koefisien Relaps
- X1 = Kelayakan Administrasi
- X2 = Informasi pemungutan Retribusi
- X3 = Otorisasi Biaya
- e = Kesalahan (Kesalahan Sisa)

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk menjawab spekulasi dalam kajian ini, dilakukan pemeriksaan relaps langsung yang berbeda dengan faktor bebas kelayakan administrasi (X<sub>1</sub>), informasi muatan (X<sub>2</sub>), dan hukuman muatan (X<sub>3</sub>) dan konsistensi individu warga negara (Y) sebagai variabel terikat. Penanganan informasi dengan menggunakan program SPSS 25, diperoleh modulus relaps langsung yang berbeda seperti yang ditampilkan pada tabel berikut:

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	Model	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9,221	1,174		7,857	,000
	Kelayakan Administrasi	,014	,051	-,019	-,268	,789
	Pemahaman Retribusi	,118	,077	-,108	-1,539	,127
	Hukuman Retribusi	,555	,051	,804	10,951	,000

a. Dependent Variable: Ketaatan Hak pembayaran Retribusi Orang Pribadi

Sumber: Informasi yang ditangani di SPSS 25 (2022)

Berdasarkan informasi pada tabel koefisien relaps, pengujian spekulasi dan percakapan hasil pemeriksaan diketahui bahwa sebagai berikut:

**Kelayakan Administrasi untuk Konsistensi Individu Warga Negara**

Administration Quality memiliki koefisien relaps yang positif menuju variabel Singular Citizen Consistence yang dapat dikatakan bahwa Help Quality sangat berdampak terhadap Individual Citizen Consistence. Ini menyiratkan bahwa semakin baik sifat administrasi, semakin tinggi konsistensi individu warga negara.

Sifat administrasi yang diberikan oleh alat tugas sangat memdampaki konsistensi warga menunjukkan bahwa sifat administrasi penilaian yang baik dan benar dapat menjadi dasar atau tolok ukur untuk meningkatkan konsistensi warga dalam melakukan komitmen pengeluarannya.

Konsekuensi dari penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dipimpin oleh Putu dan Ketut (2018) yang menyatakan bahwa Kelayakan Penolong sangat berdampak terhadap Konsistensi Individu Warga di KPP pratama.

**Mengisi Informasi tentang Konsistensi Warga Negara Individu**

Charge Information memiliki koefisien relaps positif menuju variabel Singular Citizen Consistence yang dapat dikatakan bahwa Duty Information sangat berdampak terhadap Individual Citizen Consistence. Ini menyiratkan bahwa semakin banyak informasi tugas diketahui, semakin banyak konsistensi warga negara yang dapat diperluas.

Pemahaman tentang pedoman tugas yang diberikan oleh otoritas biaya sangat memdampaki konsistensi warga menunjukkan bahwa pemahaman yang baik dan benar tentang pedoman biaya dapat menjadi dasar atau tolok ukur untuk meningkatkan konsistensi warga dalam melakukan komitmen tugas mereka.

Konsekuensi dari penelitian ini diketahui bahwa sesuai dengan hasil penelitian yang telah diarahkan oleh Putu dan Ketut (2018), yang menyatakan bahwa informasi pemungutan retribusi sangat memdampaki konsistensi individu warga negara di KPP Pratama dan Wardani dan Wati (2018), yang



menyatakan bahwa informasi tentang ketetapan retribusi secara tegas memdampaki konsistensi warga negara.

### **Biaya Persetujuan untuk Konsistensi dengan Individu Warga Negara**

Charge Approvals memiliki koefisien relaps positif pada variabel Singular Citizen Consistence yang dapat dikatakan bahwa Duty Approvals secara tegas memdampaki Individual Citizen Consistence. Ini menyiratkan bahwa semakin kaku biaya yang dikeluarkan, semakin tinggi konsistensi individu warga negara.

Hukuman pungutan yang diberikan oleh otoritas pungutan memdampaki konsistensi warga yang menunjukkan bahwa urutan persetujuan biaya akan meningkatkan konsistensi warga dalam menyelesaikan komitmen penilaian mereka.

Konsekuensi dari penelitian ini sesuai dengan efek lanjutan dari eksplorasi yang dipimpin oleh Bhaktiar dan Harris (2020) yang menyatakan bahwa hukuman pengeluaran memdampaki konsistensi individu warga dan Putu dan Ketut (2018) yang menyatakan bahwa hukuman penilaian memdampaki konsistensi individu warga di KPP. Penting.

### **SIMPULAN**

Menilik akibat dari eksplorasi dan perbincangan di bagian yang lalu, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kelayakan Administrasi secara tegas memdampaki Konsistensi Individu Warga Negara
2. Mengisi informasi secara tegas memdampaki konsistensi individu warga negara
3. Biaya Persetujuan tegas memdampaki Konsistensi Warga Negara Individu

### **REFERENSI**

- Bhaktiar, RE (2020). DAMPAK Sifat Tugas Administrasi, Pedoman Pengenggaman Biaya DAN Persetujuan Penilaian TERHADAP Konsistensi Warga Negara INDIVIDU. Buku Harian BISNIS dan Inovasi , 12 (2), 49-61.
- Denny Erica, (2021). Dampak Otorisasi Pengeluaran pada Konsistensi Warga Negara Individu.
- Dewi Kusuma Wardani, dan Erma Wati, (2018). Dampak Sosialisasi Tugas terhadap Konsistensi Warga dengan Informasi Pengeluaran sebagai Variabel Mediasi (Konsentrasi pada Individu Warga di KPP Pratama Kebumen)
- Ghozali, Imam. (2018). Aplikasi Ujian Multivariat dengan Program SPSS. Versi 7. Perguruan Tinggi Diponegoro Semarang.
- Gunadi. (2013). Manual Ekstensif untuk Tugas Pribadi. Jakarta: PT. Media lebah madu.
- Hidayat, Nurdin, dan Dedi Purwana ES. (2018). Penilaian retribusi: Hipotesis dan Praktek. Depok: Distributor PT. Tuan Grafindo Persada
- <https://www.merdeka.com/uang/mantan-dirjen-retribusi-soroti-biaya-proporsi-2016-2020-terus-menurun.html>
- Ilyas, Wirawan B., Ricard Burton (2018). "Sudut Pandang Kewajaran dan Keyakinan dalam Penggunaan Regulasi Biaya." Jakarta: Rekanan Media Talk .
- I Putu Indra Pradnya Paramartha, Ni Ketut Rasmini (2018). Dampak Kelayakan Administrasi, Kewenangan Informasi dan Biaya terhadap Konsistensi Warga Korporat.
- Krisma Adhi Triogi, Nur Diana, dan M. Cholid Mawardi, (2021). Dampak Kewaspadaan Warga, Pemahaman Pedoman Pembelanjaan dan Pengesahan Tugas Terhadap Konsistensi Individu Warga Negara Yang Mendaftar Di KPP Pratama Malang Utara.
- Kebebasan, Pandangan (2014). Charge Organization, Distributor Erlangga Gunadi, 2013:94
- Mahardika, IGNP, Zuhri, A., dan Nuridja, IM (2018). Dampak Kelayakan Administrasi dan Perspektif Warga pada Konsistensi Perinci Warga di KPP Pratama Singaraja. Buku Harian Pelatihan Keuangan Undiksha , 5 (1).
- Mardiasmo. (2016). Ketetapan Retribusi Versi Terbaru 2016. Distributor Andi: Yogyakarta.
- Mauludin, H. (2013). Menampilkan Eksplorasi: Seorang Ajudan Untuk Direksi, Pelopor Organisasi Hirarkis. Jakarta (ID): Elex Media Komputindo.

- Pendeta Uang Republik Indonesia. (2012). Pedoman Pendeta Uang Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012.
- Mengisi, Kepala Jenderal. "Pedoman Kepala Jenderal Pembelanjaan Nomor Per-26/PJ/2014." Tentang Kerangka Anggaran Penilaian Elektronik (2012).
- Paramartha, IPIP, dan Rasmini, NK (2018). Dampak kelayakan administrasi, informasi dan hukuman tugas terhadap konsistensi warga korporasi. *E-Diary Pembukuan Perguruan Tinggi Udayana*, 15(1), 641-666.
- Pujiwidodo, D. (2016). Kesan Persetujuan Tugas Terhadap Konsistensi Individu Warga Negara. *Buku Harian Online Pemegang Buku*, 1 (No. 1), 92-116.
- Rahayu, Nurulita. (2017). "Dampak Informasi Pembelanjaan, Ketetapan Wewenang Bertugas, dan Pengampunan Penilaian Terhadap Konsistensi Warga Negara". *Pembukuan Dewantara*, Vol. 1, No., April 2017. p-ISSN: 2550-0376, eISSN: 2549-9637.
- R. Cukup Bhaktiar dan Ridwan Harris, (2020). Dampak Kelayakan Administrasi Pengeluaran, Pedoman Pemahaman Tugas dan Persetujuan Penilaian terhadap Konsistensi Individu Warga Negara (Analisis Kontekstual di Balai Penilaian Esensial Cimahi)
- Resmi, S. (2017). "Penilaian Retribusi; Hipotesis dan Kasus". Jakarta: Salemba Empat.
- Saleh, R., dan Firmansyah, I. (2021). *Dasar-dasar Pembukuan*. Distributor Pers IPB PT.
- Sapriadi D. 2013. Dampak Kelayakan Administrasi Pengeluaran, Persetujuan Penilaian dan Perhatian Warga Terhadap Konsistensi Warga Membayar PBB (Di Daerah Selupu Rejang). Skripsi. Fakultas Ilmu Keuangan, Perguruan Tinggi Negeri Padang.
- Savitri, F., dan Nuraina, E. (2017). Dampak Kewenangan Penilaian terhadap Konsistensi Warga Perorangan di Istansi Administrasi Beban Pratama Madiun. *Buku Harian Harmoni*, 5 (No. 1), 45-55.
- Sudrajat, Ajat, dan Arles Parulian Ompusunggu. (2015). "Inovasi Penggunaan Data, Penyebaran Tugas, Informasi Pengeluaran, dan Konsistensi Penilaian". *Buku harian Eksplorasi Pembukuan dan Ketetapan Retribusi JRAP*, Vol. 2, No. 2, Desember 2015.
- Sugiyono. (2015). *Strategi Eksplorasi Bisnis*. Bandung: ALPHABETA, CV.
- Peraturan Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Tata Umum Dan Tata Cara Tugas
- Wardani, Dewi Kusuma dan Asis, Moh. Rifqi. (2017). "Dampak Citizen Information, Citizen Mindfulness, dan Program Pojok Samsat Terhadap Konsistensi Warga Kendaraan Bermotor". *Pembukuan Dewantara*. Vol. 1. Tidak. 2 Oktober 2017. p-ISSN: 2550-0376. e-ISSN: 2549-9637.
- Wardani, DK, dan Wati, E. (2018). Dampak sosialisasi biaya terhadap konsistensi warga dengan informasi biaya sebagai variabel perantara (Konsentrasi pada individu warga di KPP Pratama Kebumen). *Pura-pura: Pembukuan dan Pengukur Eksplorasi Eksekutif*, 7 (1), 33-54.
- Wujarso, R., dan Napitupulu, RD (2020). Dampak Kewenangan Informasi Pengeluaran dan Penilaian terhadap Konsistensi Warga UMKM di Jakarta. *Buku harian aspek Keuangan STEI*, 29 (02), 44-56